

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pembangunan ekonomi adalah proses untuk meningkatkan pendapatan perkapita penduduk di suatu Negara dalam jangka waktu yang panjang. Pembangunan dilakukan dalam berbagai sektor kehidupan dan melibatkan kegiatan produksi. Pembangunan yang ada di suatu Negara diarahkan untuk membangun kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Peran sumber daya manusia yang meliputi jumlah dan kualitas sangat penting dibutuhkan dalam pembangunan (sukirno,2003).

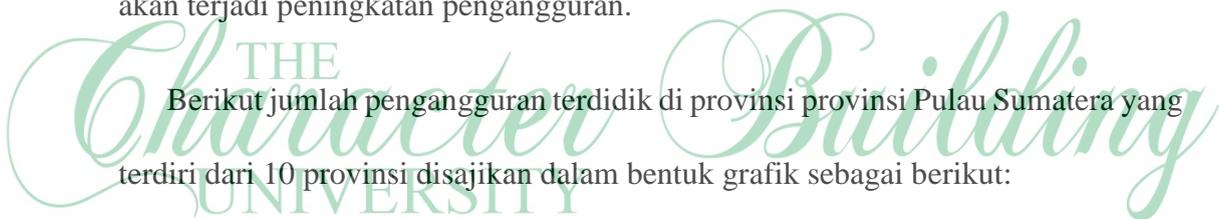
Di Indonesia tingginya tingkat pengangguran menjadi masalah yang besar dalam bidang ketenagakerjaan. Tingginya tingkat pengangguran di Indonesia diakibatkan oleh pertumbuhan angkatan kerja yang selalu meningkat akan tetapi tidak selalu diikuti dengan pertumbuhan lapangan kerja. Pengangguran digambarkan sebagai orang yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, bekerja hanya kurang dari dua hari dalam seminggu, atau seseorang yang sedang mencari pekerjaan yang lebih layak untuk dirinya. Pengangguran akan menjadi masalah yang dapat mengganggu ekonomi suatu daerah karena hal ini akan menimbulkan masalah kemiskinan dan permasalahan sosial (P.Basuki,2014).

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (2017) salah satu karakteristik dari pengangguran di Indonesia adalah tingginya pengangguran dengan pendidikan tinggi atau disebut dengan pengangguran terdidik. Formula pengangguran terdidik

dinyatakan sebagai jumlah pencari kerja yang berpendidikan tingkat atas (SLTA) dan yang setara ditambah yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi (Diploma dan Sarjana) terhadap jumlah tenaga kerja.

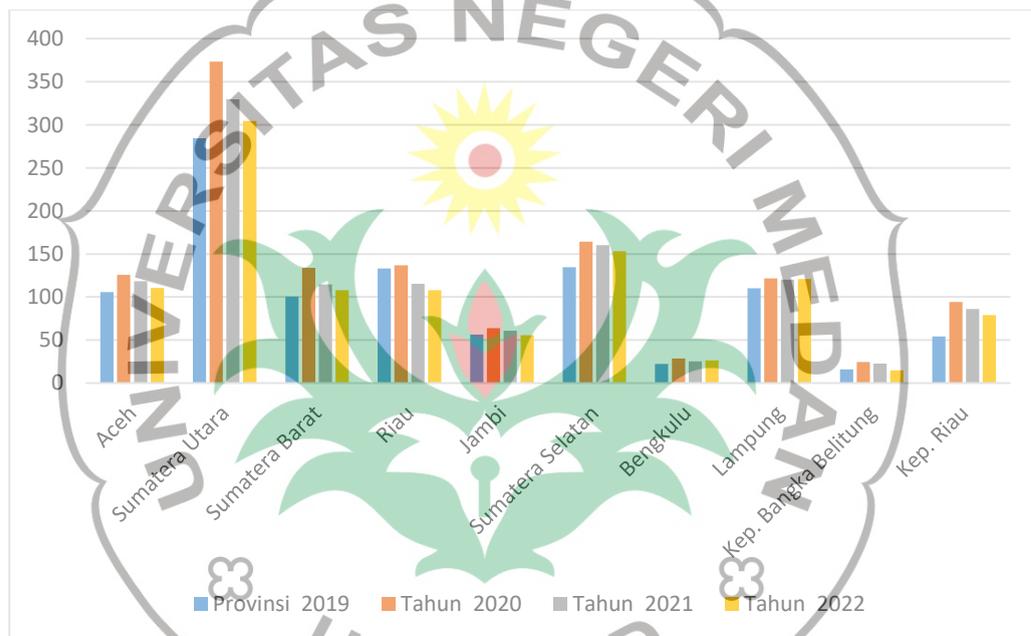
Menurut BPS (2004), tingkat pengangguran terdidik merupakan rasio jumlah pencari kerja yang berpendidikan SLTA keatas (sebagai kelompok terdidik) terhadap besarnya angkatan kerja pada kelompok tersebut. Pengangguran yang didominasi oleh tenaga kerja dengan pendidikan sekolah menengah keatas (baik umum maupun kejuruan) dan pendidikan tinggi (diploma dan sarjana) hampir terjadi pada seluruh Provinsi yang ada di Indonesia, tidak terkecuali Provinsi Provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera merupakan salah satu Pulau terbesar yang ada di Indonesia dengan luas pulau sebesar 443.066 km<sup>2</sup> dan jumlah populasinya mencapai 57.940.351 jiwa (Badan Pusat Statistik 2019). Dengan jumlah populasi yang besar tersebut jika tidak di ikuti dengan pertumbuhan lapangan kerja dan sumber daya manusia yang berkualitas, tidak dapat dihindari akan terjadi peningkatan pengangguran.

Berikut jumlah pengangguran terdidik di provinsi provinsi Pulau Sumatera yang terdiri dari 10 provinsi disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



**Gambar 1.1**

**Jumlah Pengangguran Terdidik Berumur 15 Tahun ke Atas Setiap Provinsi di Pulau Sumatera (Jiwa)**



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Dari gambar 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah pengangguran terdidik di setiap provinsi di Pulau Sumatera sebagian besar mengalami peningkatan. Adapun jumlah pengangguran terdidik tertinggi berada di provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 373.596 jiwa pada tahun 2020, hal ini disebabkan karena Covid 19 yang menyebabkan pengangguran hampir di seluruh provinsi di Indonesia mengalami peningkatan, serta jumlah pengangguran terdidik terendah berada di provinsi Bangka Belitung yaitu sebesar 14.775 jiwa pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang tidak baik di 10 provinsi Pulau Sumatera.

Kecenderungan meningkatnya angka pengangguran terdidik telah menjadi masalah yang semakin serius. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh semakin tinggi

tingkat pendidikan yang ditamatkan maka makin tinggi juga aspirasi untuk mendapatkan kedudukan atau kesempatan kerja yang lebih sesuai. Proses untuk mencari kerja yang lebih lama pada kelompok pencari kerja terdidik disebabkan mereka lebih banyak mengetahui perkembangan informasi di pasar kerja, dan mereka lebih berkemampuan untuk memilih pekerjaan yang diminati dan menolak pekerjaan yang tidak sesuai (Mulyono,1997).

Pengangguran yang meningkat akan menimbulkan masalah masalah sosial seperti produktivitas masyarakat yang rendah yang akan mengakibatkan pendapatan masyarakat tersebut ikut rendah. Pendapatan masyarakat yang rendah akan mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat dan menyebabkan masyarakat akan mengurangi konsumsinya. Akhirnya hal tersebut akan menurunkan kualitas hidup maupun kesejahteraan masyarakat. Banyaknya pengangguran juga akan meningkatkan kriminalitas, ketidakstabilan politik, dan kemiskinan (Nila,2017).

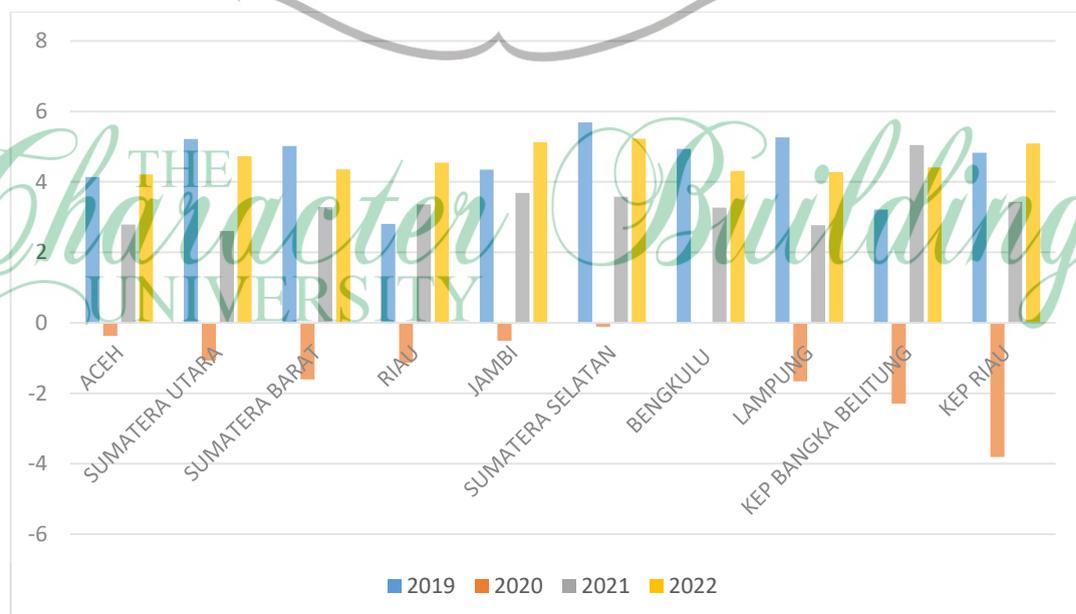
Naik turunnya tingkat pengangguran di pengaruhi oleh berbagai faktor seperti pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah kemampuan suatu perekonomian dalam memproduksi barang atau jasa dalam kurun waktu untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan PDB dan digunakan untuk mengukur keadaan ekonomi yang sedang berlangsung. PDRB harga konstan digunakan sebagai pertumbuhan ekonomi untuk cakupan daerah.

Dalam hubungan tingkat PDRB serta pengaruhnya terhadap tingkat pengangguran digunakanlah teori Hukum Okun (Okun's law). Di dalam Hukum Okun dijelaskan bahwa setiap kenaikan PDRB terjadi, maka di daerah tersebut penyerapan tenaga kerja akan meningkat dan pada akhirnya akan terjadi penurunan pengangguran (Hartanto & Masjkuri, 2017).

Disaat pertumbuhan ekonomi menurun maka jumlah pengangguran bertambah. Namun apabila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka ada penambahan jumlah produksi barang atau jasa sebagai akibat dari kenaikan tersebut. Pada akhirnya akan dilakukan penyerapan terhadap tenaga kerja, yang tadinya jumlah pengangguran tinggi akan menjadi berkurang.

**Gambar 1.2**

**Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen)**



*Sumber: Badan Pusat Statisti(diolah)*

Dari gambar 1.2 dapat dilihat bahwa sebagian besar pertumbuhan ekonomi di 10 provinsi yang ada di Pulau Sumatera mengalami fluktuasi. Pertumbuhan ekonomi tertinggi berada di provinsi Sumatera selatan yaitu sebesar 5.69% pada tahun 2019, sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah berada di provinsi Bengkulu tahun 2022 sebesar -0.02. Pertumbuhan ekonomi di Lampung tahun 2021 besarnya 2.77% dan tahun 2022 sebesar 4.28%. Di saat pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung mengalami kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2022, jumlah pengangguran terdidik juga mengalami kenaikan dengan jumlah 860 jiwa. Berdasarkan data tersebut hal ini tidak sejalan dengan teori hukum okun yang menyatakan jika jumlah PDRB mengalami kenaikan maka jumlah pengangguran akan berkurang.

Tentunya juga sudah banyak penelitian terdahulu yang mengkaitkan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengangguran Terdidik. Secara teori Perumbuhan Ekonomi memberikan dampak yang negatif terhadap Pengangguran Terdidik. Hal ini sejalan dengan hasil peneli sebelumnya Rizka (2015) dan Rahmania (2019). Namun ternyata hasil riset ini bertentangan dengan hasil riset peneliti lainnya Rosalina (2018) dan Alfian (2021) menyimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pengangguran Terdidik. Dengan adanya perbedaan hasil riset antara peneliti ini menjadi penelitian yang menarik untuk melihat lebih jauh kaitan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengangguran Terdidik di Pulau Sumatera.

Indikator ekonomi selanjutnya yang berpengaruh terhadap pengangguran terdidik ialah upah. Upah adalah imbalan atas pekerjaan yang sudah dilakukan dan

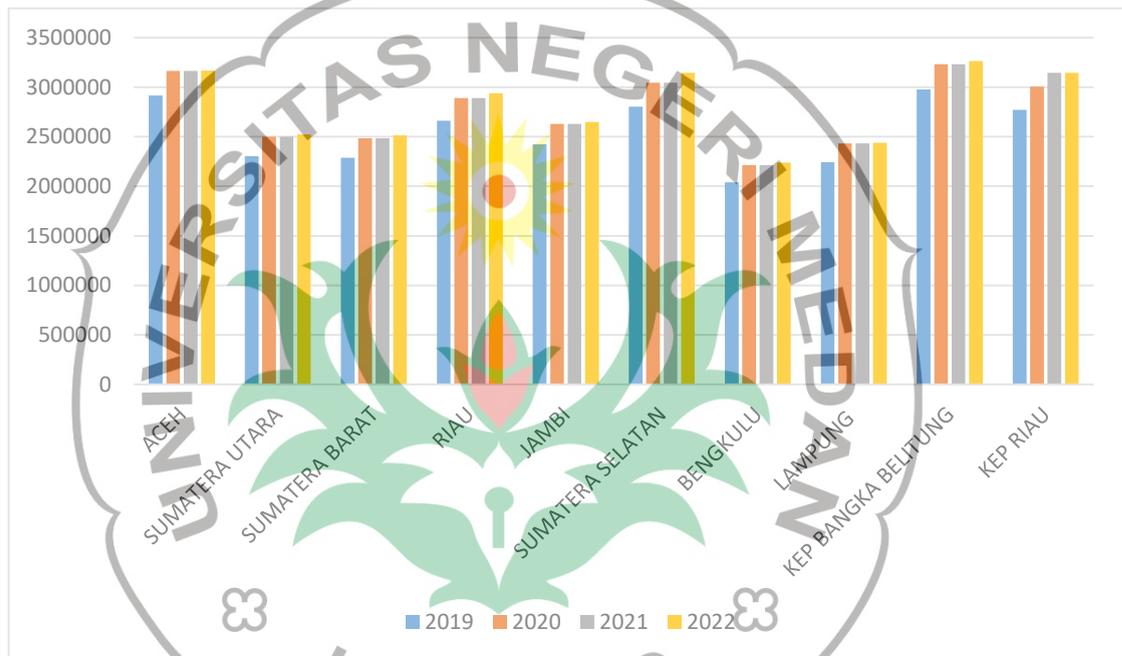
itu adalah hak wajib yang diterima pekerja. Dalam hal ini tinggi rendahnya upah akan berpengaruh terhadap pengangguran. Setiap pemerintah di provinsi Pulau Sumatera telah menetapkan upah terendah yang berlaku di wilayahnya, yaitu upah minimum provinsi. UMP digunakan sebagai standar minimum oleh para pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha sektor formal.

Upah sangat mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap permintaan dan penawaran tenaga kerja, adanya perubahan upah yang terjadi akan mempengaruhi besar kecilnya penawaran tenaga kerja. Dalam teori Kaufman & Hotckiss (1999) penetapan tingkat upah yang dilakukan pemerintah dalam suatu Negara akan memberikan dampak terhadap tingkat pengangguran sebab semakin tinggi besaran upah yang ditetapkan maka akan meningkatkan jumlah orang yang bekerja pada suatu Negara tersebut, sehingga akan menurunkan jumlah pengangguran.

THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY

Gambar 1.3

## Upah Minimum Provinsi di Provinsi Pulau Sumatera (Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Dari gambar 1.3 dapat dilihat bahwa upah minimum provinsi yang ada di Pulau Sumatera selalu meningkat. Upah minimum tertinggi berada di provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar Rp.3.264.884 pada tahun 2022, sedangkan tingkat upah terendah berada di provinsi Bengkulu sebesar Rp. 2.040.407 pada tahun 2019.

Upah Minimum di provinsi Sumatera Utara tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp.2.303.403 dan tahun 2020 sebesar Rp.2.499.423. Di saat upah minimum provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020, jumlah pengangguran terdidik mengalami kenaikan juga dengan jumlah 88.957 jiwa. Berdasarkan data tersebut hal ini tidak sejalan dengan teori Kaufman dan Hotckiss

yang menyatakan penetapan tingkat upah yang dilakukan pemerintah dalam suatu Negara akan memberikan dampak pada tingkat pengangguran. Jika upah mengalami kenaikan maka penawaran untuk tenaga kerja akan mengalami kenaikan sehingga jumlah pengangguran akan semakin berkurang.

Penelitian yang mengkaitkan antara Upah dengan Pengangguran Terdidik tentunya sudah banyak diteliti sebelumnya. Secara teori upah berpengaruh negatif terhadap Pengangguran Terdidik. Hal ini selaras dengan hasil penelitian sebelumnya Rizka (2015) dan Rahmania (2019). Namun hal ini bertentangan dengan hasil penelitian lainnya, R Ahcmad, Nanik Istiyani (2017) yang menyatakan bahwa Upah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pengangguran Terdidik. Pastinya kesenjangan hasil penellitian antar peneliti menjadi penelitian yang menarik untuk melihat lebih jauh kaitan antara Upah dengan Pengangguran Terdidik di Pulau Sumatera.

Selain upah, faktor lain yang mempengaruhi pengangguran terdidik adalah Indeks Pembangunan Manusia. Teori pertumbuhan ekonomi menekankan adanya peran pemerintah dalam mengembangkan sumber daya manusia dan produktivitas manusia. Dengan berinvestasi di bidang pendidikan akan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerjanya serta meningkatkan kualitas. Pengetahuan dan keahlian seseorang akan tumbuh seiring dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang akan meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Perusahaan yang memperkerjakan seseorang yang memiliki produktivitas

tinggi akan menerima hasil yang baik, sehingga dengan tingginya penyerapan tenaga kerja akan mengurangi tingkat pengangguran (Todaro,2000).

Pengaruh antara indeks pembangunan manusia dengan pengangguran dijelaskan oleh Todaro (2000), bahwa indeks pembangunan manusia merupakan tujuan dari pembangunan itu sendiri. Pembangunan merupakan kunci sebuah Negara untuk mampu menyerap teknologi modern dalam mengembangkan kapasitasnya, agar tercipta kesempatan kerja dalam mengurangi jumlah pengangguran yang pada akhirnya nanti menciptakan pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal ini bahwasanya pembangunan manusia diukur melalui besarnya nilai IPM. Nilai IPM yang tinggi akan berdampak dalam mengurangi tingkat pengangguran dalam suatu wilayah.

**Gambar 1.4**  
**Indeks Pembangunan Manusia (Persen)**



*Sumber:Badan Pusat Statistik(diolah)*

Dari gambar 1.4 dapat dilihat bahwa nilai IPM hampir setiap provinsi yang ada di Pulau Sumatera mengalami peningkatan. Nilai indeks pembangunan manusia tertinggi berada di provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 yaitu sebesar 75.48, sedangkan nilai indeks pembangunan terendah berada di provinsi Lampung pada tahun 2019 yaitu sebesar 69.57. Nilai IPM provinsi Bengkulu tahun 2021 sebesar 71.64 dan tahun 2022 sebesar 72.16. Saat IPM di provinsi Bengkulu mengalami kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2022, jumlah pengangguran terdidik juga mengalami kenaikan sebesar 798 jiwa. Berdasarkan data tersebut hal ini tidak sejalan dengan teori Todaro yang mengatakan bahwa nilai indeks pembangunan manusia yang semakin besar akan mengurangi pengangguran dalam suatu wilayah.

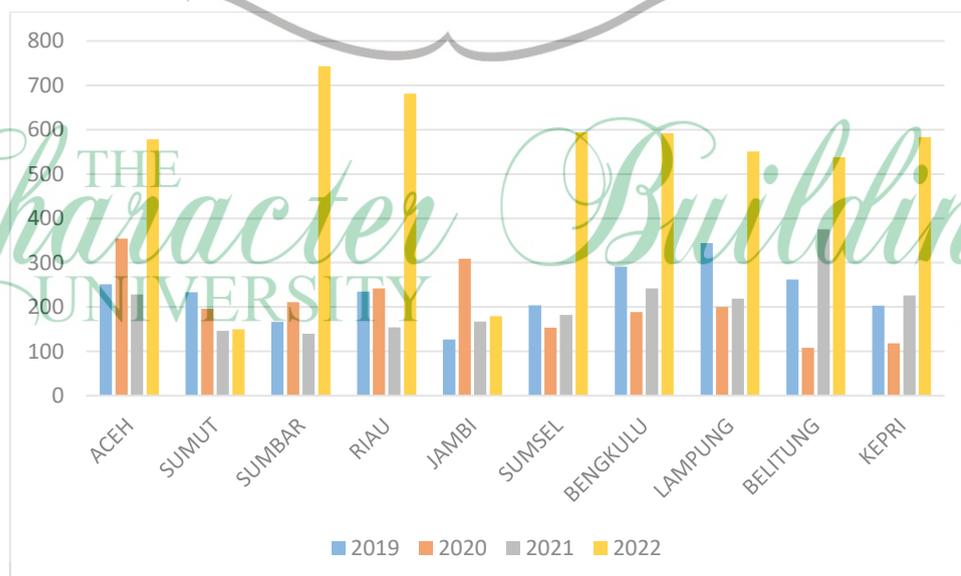
Tentunya sudah banyak penelitian terdahulu yang mengkaitkan antara Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengangguran Terdidik. Secara teori, Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dengan Pengangguran Terdidik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya Aulia dan Agusalim (2022). Namun ternyata hasil riset ini bertentangan dengan hasil riset peneliti lainnya Nurcholis (2014) menyimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap Pengangguran Terdidik. Dengan adanya perbedaan hasil riset antar peneliti ini menjadi penelitian yang menarik untuk melihat lebih jauh kaitan Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengangguran Terdidik di Pulau Sumatera.

Selain Indeks Pembangunan Manusia, faktor lain yang dapat mempengaruhi pengangguran terdidik di pulau Sumatera yaitu inflasi. Inflasi adalah naiknya harga-harga komoditi dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. Inflasi kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus

sepanjang waktu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut dengan inflasi kecuali bila kenaikan terjadi secara meluas atau dapat mengakibatkan kenaikan pada barang lainnya.

Philips dalam Mankiw (2007) menggambarkan bagaimana hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa tingkat inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan yaitu jika permintaan naik maka harga akan naik. Dengan tingginya harga (inflasi) maka akan memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibatnya pengangguran berkurang.

**Gambar 1.5**  
**Inflasi di Provinsi Pulau Sumatera**



*Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)*

Berdasarkan grafik 1.5 terlihat bahwa tingkat inflasi yang paling tinggi berada di provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 yaitu sebesar 7.43, dan inflasi terendah di provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 0.46 pada tahun 2022. Nilai inflasi provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 sebesar 1.66% dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 2.11%. Di saat tingkat inflasi di Sumatera barat mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020, jumlah pengangguran terdidik juga mengalami kenaikan yaitu sebesar 33.359 jiwa. Berdasarkan data tersebut hal ini tidak sesuai dengan teori Philips yang menyatakan jika tingkat inflasi meningkat maka pengangguran akan menurun.

Tingkat inflasi mempunyai hubungan yang positif atau negatif terhadap tingkat pengangguran. Apabila tingkat inflasi yang dihitung adalah tingkat inflasi yang terjadi pada harga-harga secara umum, maka tingginya tingkat inflasi yang terjadi akan berakibat pada peningkatan pada tingkat bunga (pinjaman). Oleh karena itu, dengan tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi investasi untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif. Hal ini akan berpengaruh pada jumlah pengangguran yang tinggi karena rendahnya kesempatan kerja sebagai akibat dari rendahnya investasi. Inflasi dalam jangka pendek mempunyai pengaruh negatif dikarenakan jika permintaan tinggi maka harga akan naik (inflasi) akibatnya produsen dalam memenuhi permintaan menambah kapasitas produksinya dengan menambah jumlah tenaga kerja, akibatnya pengangguran berkurang. Inflasi memiliki pengaruh positif dalam jangka Panjang dikarenakan pada saat harga naik

dikarenakan biaya yang naik sehingga permintaan akan turun, sehingga tidak banyak memproduksi akibatnya dapat meningkatkan pengangguran.

Penelitian yang mengkaitkan antara Inflasi dengan Pengangguran Terdidik tentunya sudah banyak diteliti sebelumnya. Secara teori Inflasi berdampak negatif terhadap Pengangguran terdidik. Hal ini selaras dengan penelitian Rizka (2015). Namun, hal ini bertentangan dengan hasil riset lainnya Khoirun (2020), Agusalim (2022), yang menyatakan bahwa Inflasi berpengaruh positif terhadap Pengangguran Terdidik. Pasti ada kesenjangan hasil penelitian antar peneliti menjadi penelitian yang menarik untuk melihat lebih jauh kaitan antara Inflasi dengan Pengangguran Terdidik.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk menganalisis faktor faktor yang mempengaruhi pengangguran terdidik, khususnya pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. Dan yang menjadi tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana pengaruh dari variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, indeks pembangunan manusia, dan inflasi terhadap pengangguran terdidik pada setiap provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sumatera.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, ditemukan masalah sebagai berikut:

1. Jumlah pengangguran terdidik di setiap provinsi di Pulau Sumatera mengalami fluktuasi dan Sumatera Utara sebagai provinsi dengan jumlah pengangguran terdidik paling tinggi di Pulau Sumatera.
2. Jumlah PDRB yang selalu mengalami peningkatan tetapi tidak diikuti dengan jumlah pengangguran terdidik yang berkurang
3. Upah minimum yang cenderung meningkat setiap tahunnya di setiap provinsi belum mampu menyerap tenaga kerja dalam mengurangi jumlah pengangguran terdidik.
4. Indeks pembangunan manusia setiap provinsi di Pulau Sumatera belum mampu dalam mengurangi jumlah pengangguran terdidik.
5. Inflasi setiap provinsi di Pulau Sumatera belum mampu dalam mengurangi jumlah pengangguran terdidik.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, batasan masalah diberikan agar penelitian lebih terfokus dan terarah, batasan tersebut antara lain:

1. Penelitian ini menggunakan variabel dependen Pengangguran Terdidik serta variabel independen Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Inflasi di Pulau Sumatera tahun 2019-2022.
2. Data variabel yang digunakan merupakan data 10 provinsi yang ada di Pulau Sumatera.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran Terdidik di Pulau Sumatera.
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Pengangguran Terdidik di Pulau Sumatera.
3. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pengangguran Terdidik di Pulau Sumatera.
4. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Pengangguran Terdidik di Pulau Sumatera.
5. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Inflasi secara simultan terhadap Pengangguran Terdidik di Pulau Sumatera.



#### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran Terdidik di Pulau Sumatera.

2. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Pengangguran Terdidik setiap provinsi di Pulau Sumatera.
3. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pengangguran Terdidik setiap provinsi di Pulau Sumatera.
4. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap Pengangguran Terdidik di Pulau Sumatera.
5. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Inflasi secara simultan terhadap Pengangguran Terdidik di Pulau Sumatera.

#### 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat antara lain:

1. Pemerintah

Memberikan sumbangan bagi pemerintah, khususnya pemerintah di provinsi Pulau Sumatera dalam menentukan kebijakan ketenagakerjaan, dengan memberikan gambaran kepada pihak pemerintah maupun pihak lain yang terkait dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan, khususnya pada permasalahan pengangguran terdidik.

2. Peneliti

Dapat memperoleh pemahaman yang lebih mengenai pengangguran terdidik di setiap provinsi di Pulau Sumatera.

### 3. Pihak lain

Menjadi bahan literatur untuk kalangan akademis dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengangguran terdidik.



*THE*  
*Character Building*  
*UNIVERSITY*